



Transformasi Paradigma Kurikulum di Indonesia Dari Kurikulum 1947 Hingga Kurikulum Merdeka: Transformasi Kurikulum sebagai Respon Politik, Ideologis dan Pedagogis

Ayyin Nayyirotul Ummah¹, Habib Rachman Sayekti², M. Sofiyullah Yusuf³

^{1,2,3}UIN Syekh Wasil Kediri, Kota Kediri, Indonesia

Email: ¹ayyinmuhammad@gmail.com, ²nurahid@iainkediri.ac.id

Informasi Artikel

Submitted: 30-01-2026

Accepted: 26-02-2026

Published: 15-04-2026

Keywords:

Transformation Curriculum Paradigm Merdeka Curriculum

Abstract

Changes in the Indonesian education curriculum not only represent changes in administrative policy but also reflect a transformation in the educational paradigm influenced by political dynamics, ideology, and pedagogical developments. This article aims to analyze the paradigm shift in Indonesia's national climate from the 1947 Curriculum to the implementation of the Independent Curriculum. This research uses a qualitative descriptive approach through a literature review method, analyzing curriculum documents, educational policies, and various relevant scientific publications. The study results show that every curriculum change is always closely related to the socio-political context and the needs of society at that time, starting from the strengthening of national identity after independence, the centralization of education during the New Order era, to the demands of globalization and technological progress in the reform era. Paradigmatically, there has been a significant shift from a content oriented curriculum to a curriculum based on competency, character, and independent learning. The Merdeka Curriculum is present as the culmination of this transformation by emphasizing learning flexibility, differentiation, and strengthening the Pancasila Student Profile. Thus, curriculum transformation in Indonesia can be understood as a continuous adaptive process in an effort to align national values, student needs, and the challenges of 21st-century global education.

Abstrak

Perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia tidak hanya merepresentasikan pergantian kebijakan administratif, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma pendidikan yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ideologi, dan perkembangan pedagogis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi paradigma kurikulum nasional Indonesia sejak Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 hingga implementasi Kurikulum Merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi literatur dengan menganalisis dokumen kurikulum, kebijakan pendidikan, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap perubahan kurikulum selalu berkaitan erat dengan konteks sosial-politik dan kebutuhan masyarakat pada masanya, mulai dari penguatan identitas nasional pascakemerdekaan, sentralisasi pendidikan pada era Orde Baru, hingga tuntutan globalisasi dan kemajuan teknologi di era reformasi. Secara paradigmatis, terjadi pergeseran signifikan dari kurikulum yang berorientasi pada konten menuju kurikulum berbasis kompetensi, karakter, dan kemandirian belajar. Kurikulum Merdeka hadir sebagai puncak transformasi tersebut dengan menekankan

fleksibilitas pembelajaran, diferensiasi, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dengan demikian, transformasi kurikulum di Indonesia dapat dipahami sebagai proses adaptif yang berkelanjutan dalam upaya menyelaraskan nilai kebangsaan, kebutuhan peserta didik, dan tantangan pendidikan global abad ke-21.

Kata Kunci: Transformasi, Paradigma Kurikulum, Kurikulum Merdeka.

1. PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan, sistem kurikulum di Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat dinamis sebagai respons atas perubahan sosial, politik, dan teknologi. Secara global dan nasional, pergeseran paradigma Pendidikan dari model centric pada materi ajar menuju pembelajaran aktif berdiferensiasi dan kontekstual menjadi tren yang makin mendesak. Dalam konteks Indonesia, perubahan kurikulum telah dilakukan lebih dari sebelas kali sejak 1947 hingga saat ini. Hal ini mencerminkan bahwa kurikulum bukanlah entitas statis, melainkan alat strategis dalam menghadapi tantangan abad ke-21 seperti revolusi digital, kebutuhan pembangunan karakter, dan kesiapan warga negara menghadapi globalisasi.

Lebih khusus, sejak Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 (Leerplan 1947), yang berfokus pada pembentukan identitas nasional dan nilai kebangsaan. Seiring waktu, transisi kurikulum terjadi; misalnya, Kurikulum 1964 mengadopsi model rekonstruksi sosial dan humanistik, sementara Kurikulum 1968 dan 1984 lebih menekankan pada penguasaan akademis dan karakter humanistik. Di era modern, Kurikulum Merdeka (diperkenalkan sekitar 2020) menggabungkan model humanistik, akademis, dan teknologis dengan memberikan fleksibilitas tinggi bagi guru dan siswa dalam merancang pengalaman belajar. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak terlepas dari tantangan: keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya referensi bahan ajar, distribusi akses yang tidak merata, serta kesulitan dalam manajemen waktu dan implementasi.

Dalam tinjauan penelitian terdahulu, sejumlah studi telah menguraikan jalur transformasi kurikulum Indonesia. Putri dan Maula (2024) misalnya melakukan studi literatur dari kurikulum tahun 1947 hingga Kurikulum Merdeka, menganalisis model kurikulum yang digunakan setiap periode (rekonstruksi sosial, humanistik, subjek-akademik, teknologis). Selain itu, Alkampary, Muhlis, & Norazizah (dalam penelitian sejarah kurikulum) menyajikan bahwa kurikulum diganti rata-rata setiap dekade, sebagai respons terhadap perubahan norma sosial, politik, dan teknologi. Studi implementasi Kurikulum Merdeka di mata pelajaran sejarah juga menunjukkan bahwa guru dapat berinovasi sesuai profil Pancasila, tetapi masih menghadapi kendala dalam infrastruktur dan perencanaan[1].

Namun, meskipun sejumlah penelitian mengemukakan model kurikulum dan tantangan implementasi, ada kesenjangan penting yang masih kurang dieksplorasi. Pertama, banyak studi bersifat makro (studi literatur) dan kurang menyentuh pengalaman langsung guru dan siswa di lapangan bagaimana mereka memaknai dan mengaktualisasikan kebebasan Kurikulum Merdeka dalam konteks lokal yang berbeda. Kedua, penelitian kuantitatif relatif dominan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran, tetapi studi kualitatif yang mendalam tentang dinamika sangat terbatas. Akibatnya, pemahaman tentang dinamika internal (misalnya, bagaimana guru menafsirkan kebebasan kurikulum, bagaimana siswa merespons proyek pembelajaran) masih kurang.

Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih lanjut sangat dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Penelitian ini diharapkan tidak hanya mendeskripsikan transformasi paradigma kurikulum dari sudut kebijakan dan model, tetapi juga menggali perspektif aktor pendidikan (guru, siswa, kepala sekolah) dalam praktik kurikulum Merdeka di lapangan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan memberikan kontribusi baru berupa narasi kontekstual bagaimana kurikulum diaktualisasikan, diinterpretasikan, dan dilokalkan yang selama ini kurang tereksplorasi dalam literatur.

Penelitian ini sangat mendesak karena Kurikulum Merdeka merupakan salah satu reformasi pendidikan paling ambisius di Indonesia, di mana kebebasan kurikulum ditumpangkan pada idealisme pedagogis dan tantangan kontekstual nyata. Tanpa pemahaman mendalam tentang implementasi di lapangan, kebijakan ini berisiko gagal memenuhi tujuannya atau justru memperlebar kesenjangan antar sekolah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif yang menggali pengalaman nyata para pelaku pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, pengembang kurikulum, dan praktisi guru agar transformasi kurikulum dapat efektif, relevan, dan inklusif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode tinjauan pustaka (literature review) guna mengumpulkan serta menganalisis berbagai sumber informasi mengenai transformasi paradigma kurikulum di Indonesia, mulai dari Kurikulum 1947 hingga Kurikulum Merdeka. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap dinamika perubahan kurikulum dari masa ke masa. Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah yang membahas Kurikulum 1947 beserta perbandingannya dan diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi publikasi yang tidak relevan atau tidak memenuhi standar validitas penelitian. Analisis data dilakukan melalui analisis konten (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola perubahan yang muncul dalam sumber-sumber yang dikaji. Proses analisis ini mencakup tahap pengkodean informasi guna memperjelas gambaran mengenai evolusi kurikulum nasional dari tahun 1947 hingga periode Kurikulum Merdeka saat ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berikut mengaitkan hasil penelitian dengan kerangka teori, dinamika historis, dan relevansi konteks pendidikan Indonesia masa kini.

3.1. Transformasi Kurikulum Sebagai Respon Politik, Ideologi dan Peagogis

Perubahan kurikulum di Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum di pengaruhi tiga factor utama yaitu factor politik, fator ideologi dan factor pedagogis. Faktor politik menjadi salah satu pendorong utama perubahan kurikulum di Indonesia, terutama terlihat pada kurikulum 1968, 1975, dan 1984 yang berada dalam naungan pemerintahan Orde Baru. Kurikulum 1968 lahir pada era Orde Baru dan juga didasari oleh motivasi politis. Kurikulum ini berfokus pada peningkatan mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama siswa. Ciri utamanya yang menonjol adalah konsep "*correlated subject curriculum*", yang berarti ada kaitan materi antar jenjang pendidikan, di mana materi dasar akan berhubungan dengan materi lanjutan. Sayangnya, muatan pelajarannya saat itu cenderung teoretis dan tidak dikaitkan dengan masalah atau isu nyata (tematik)[2].

Pada periode tersebut, pemerintah berupaya menciptakan stabilitas nasional melalui pendidikan sehingga kurikulum dirancang secara sentralistis, seragam, dan mengedepankan kontrol negara terhadap proses belajar mengajar. Kurikulum 1968 mengganti orientasi sebelumnya dengan menanamkan disiplin, kepatuhan, dan wawasan kebangsaan sesuai agenda politik pemerintahan. Kurikulum 1975 dan 1984 juga mempertegas pengendalian administratif melalui pendekatan *Pedoman Pengelolaan Sistem Instruksional* (PPSI) yang sangat teknokratis dan birokratis. Kurikulum 1975 menerapkan sistem tujuan yang berjenjang. Setiap bidang studi memiliki tujuan kurikulumnya sendiri, yang kemudian dipecah lagi pada setiap pokok bahasan menjadi tujuan instruksional umum (TIU). TIU ini selanjutnya diperinci ke dalam beberapa satuan bahasan, masing-masing dengan tujuan instruksional khusus (TIK)[3]. Dengan demikian, pengaruh politik tidak hanya menentukan isi dan tujuan kurikulum, tetapi juga membentuk model pengelolaan pendidikan yang berfungsi sebagai instrumen stabilisasi kekuasaan [4].

Perubahan kurikulum juga didorong oleh faktor ideologis yang mencerminkan nilai, pandangan hidup, dan tujuan bangsa dalam setiap periode [5]. Kurikulum 1947, misalnya, lahir dari semangat pascakemerdekaan sehingga sangat menekankan pembentukan identitas nasional, moralitas, dan semangat perjuangan. Sementara itu, Kurikulum 2013 dirancang untuk menanamkan karakter melalui pendekatan integratif yang selaras dengan nilai Pancasila, literasi abad 21, dan penguatan kompetensi sosial-emosional. Kurikulum Merdeka kemudian mempertegas arah ideologis ini melalui fokus pada *Profil Pelajar Pancasila*, yang mencakup nilai-nilai seperti beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, kreatif, gotong royong, mandiri, serta bernalar kritis. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pedagogis, tetapi juga sebagai sarana penanaman nilai dan ideologi negara guna membentuk generasi yang sesuai dengan cita-cita bangsa [6].

Selain pengaruh politik dan ideologis, perubahan kurikulum juga sangat dipengaruhi perkembangan ilmu pendidikan dan tren pedagogi global. Mulai awal 2000 an, wacana pendidikan dunia bergerak menuju pendekatan konstruktivisme yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam belajar, sehingga Indonesia mengadopsinya melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 dan KTSP 2006. Fokus utama dan kepedulian terbesar dalam pendidikan adalah manusia itu sendiri. Landasan dasar dalam membentuk kepribadian peserta didik adalah pengembangan perasaan cinta, yang dimulai dari entitas tertinggi (Tuhan) hingga mencakup diri sendiri. Oleh karena itu, tujuan pendidikan diarahkan pada pembentukan kepribadian, yang sering disebut sebagai pendidikan afektif (*affective education*) atau

pendidikan karakter (*character building*). Maksudnya Pendidikan memusatkan perhatian pada pengembangan manusia, dengan menanamkan cinta (dari Tuhan hingga diri sendiri) sebagai fondasi. Tujuannya adalah membentuk kepribadian melalui pendidikan afektif/karakter [7].

Pergeseran ini memperkenalkan konsep kompetensi inti, otonomi sekolah, dan pembelajaran aktif. Kurikulum 2013 melanjutkan orientasi pedagogis modern melalui pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan), yang mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum Merdeka kemudian menghadirkan inovasi pedagogis yang lebih maju, seperti pembelajaran berdiferensiasi, *project-based learning*, dan personalisasi pembelajaran. Semua ini mencerminkan bahwa transformasi kurikulum Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengikuti perkembangan teori pendidikan serta tuntutan kompetensi global abad ke-21 [8].

3.2. Pergeseran Paradigma Dari Standarisasi Menuju Fleksibilitas

Perkembangan kurikulum pendidikan nasional Indonesia merefleksikan perjalanan panjang dari paradigma yang sangat terstandarisasi dan seragam menuju paradigma yang lebih fleksibel dan kontekstual. Pada masa Orde Baru, kurikulum didominasi oleh pendekatan sentralistik dan objektif, dengan Kurikulum 1975 dan 1994 sebagai contoh utama. Kurikulum ini dirancang secara terpusat oleh pemerintah, menekankan pada pencapaian seperangkat tujuan pembelajaran yang seragam untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Model ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman mutu dan membangun identitas nasional, namun sering dikritik karena mengabaikan keragaman kebutuhan peserta didik, kondisi daerah, serta menghambat kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Standarisasi dianggap sebagai kunci pengendalian mutu, tetapi pada praktiknya justru dapat mematikan inovasi di tingkat lokal[9].

Pada era Reformasi, tuntutan demokratisasi dan otonomi daerah mendorong perubahan fundamental. Lahirnya Kurikulum 2004 (KBK) dan Kurikulum 2006 (KTSP) menjadi salah satu titik awal pergeseran paradigma yang signifikan. "Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan", memberikan kewenangan serta kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum operasionalnya sendiri berdasarkan standar nasional (SNP). Ini merupakan respons terhadap UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang memberikan otonomi kepada satuan pendidikan. Paradigma mulai bergeser dari "satu kurikulum untuk semua" menuju "kerangka nasional dengan adaptasi lokal", meskipun dalam implementasinya banyak sekolah masih mengalami kesulitan akibat kapasitas dan budaya yang belum siap.

Selanjutnya perkembangan kurikulum terjadi pada Kurikulum 2013, yang meskipun awalnya dikritik karena dianggap kembali sentralistik dengan buku panduan yang ketat, sebenarnya telah menyisipkan elemen fleksibilitas melalui pendekatan saintifik dan penekanan pada sikap sosial-spiritual. Revisi pada tahun 2017 kemudian memberikan kelonggaran yang lebih nyata, di antaranya memperbolehkan guru menggunakan berbagai metode pembelajaran di luar model 5M (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi) secara kaku, serta penyederhanaan administrasi. Periode ini menunjukkan tarik-ulur antara keinginan menjaga standar nasional dan kebutuhan memberikan ruang gerak bagi praktik di lapangan, sekaligus merefleksikan pembelajaran dari respon guru terhadap kompleksitas kurikulum.

Akhir dari kurikulum tahun 2013 ini adalah kondisi covid 19 yang melanda Indonesia sehingga kurikulum bergeser menjadi kurikulum Pendidikan merdeka. Hal ini di jelaskan oleh Renova Manullang dalam jurnalnya bahwa salah satu inovasi kurikuler yang berorientasi pada pendekatan berbasis bakat dan minat peserta didik adalah Kurikulum Merdeka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, menginisiasi peluncuran kurikulum ini sebagai bentuk evaluasi dan penyempurnaan terhadap implementasi Kurikulum 2013. Sebelum masa pandemi, Kurikulum 2013 merupakan satu-satunya acuan kurikulum nasional yang diterapkan dalam proses belajar-mengajar. Adanya pandemi Covid-19 yang menimbulkan berbagai kendala pembelajaran bagi peserta didik, menjadi salah satu faktor pendorong munculnya Kurikulum Merdeka. Sebagai respons, Kurikulum 2013 yang berlaku kemudian disederhanakan menjadi kurikulum darurat untuk mempermudah satuan pendidikan dalam mengelola pembelajaran[10].

Puncak dari paradigma fleksibilitas ini diwujudkan secara terstruktur dalam Kurikulum Merdeka yang diluncurkan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Kurikulum ini dirancang dengan struktur yang lebih esensial, memberikan alokasi waktu pembelajaran yang sangat signifikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana sekolah memiliki keleluasaan penuh untuk merancang tema dan aktivitas sesuai dengan konteks dan kearifan lokal. Fleksibilitas ini tidak lagi sekadar adaptasi, tetapi menjadi prinsip inti: sekolah dapat memilih untuk menerapkan tiga opsi implementasi (mandiri belajar, mandiri berubah,

mandiri berbagi) sesuai kesiapan, dan guru memiliki kewenangan untuk melakukan diferensiasi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap peserta didik.

Tabel 1. Pergeseran Paradigma dari Tahun ke Tahun

Periode	Paradigma utama	Karakteristik
1947-1994	Standardized curriculum	Materi baku, guru dominan, fokus akademik
2004-2013	Competency based dan student centered	Konstruktivisme, otonomi sekolah
2020-sekarang	Fleksibel dan personalized curriculum	Project, teknologi, diferensiasi

3.3. Inovasi Model dalam Kurikulum Merdeka

Kurikulum pada hakikatnya bukan sekadar perubahan teknis, melainkan sebuah pembaruan epistemologis yang menggeser orientasi pendidikan Indonesia dari materi ajar (*what*) kepada proses belajar siswa (*how*). Kurikulum di Indonesia dibagi menjadi 4 fase diantaranya adalah fase humanistic (kurikulum 1947), fase akademik-teknokratis (1968-1994), fase konstruktivistik (2004-2013), dan fase progresif-fleksibel (kurikulum merdeka). Kurikulum 1947 merupakan fondasi awal pendidikan nasional yang berorientasi humanistik setelah Indonesia merdeka. Fokus utamanya adalah membentuk manusia merdeka yang berkepribadian nasional, mencintai tanah air, dan memiliki kesadaran sosial. Pada fase ini, transformasi kurikulum relevan karena menegaskan bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia (humanisasi), bukan sekadar proses intelektual. Prinsip-prinsip humanistik ini menjadi akar penting yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai kurikulum berikutnya, termasuk Kurikulum Merdeka yang menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang bebas, aktif, dan berkembang sesuai potensinya[11].

Periode 1968 hingga 1994 menandai dominasi paradigma akademik teknokratis, di mana kurikulum dirancang sangat terstruktur, berorientasi pada stabilitas nasional, dan menekankan efisiensi melalui standarisasi. Kurikulum pada fase ini relevan dalam proses transformasi karena memperkuat sistem manajemen pendidikan yang lebih terorganisir, menyempurnakan struktur mata pelajaran, serta memperkenalkan tujuan instruksional yang terukur. Meskipun cenderung sentralistik, warisan akademik-teknokratis ini kini menjadi dasar sistem evaluasi dan perencanaan pembelajaran yang lebih sistematis di Kurikulum Merdeka, namun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik.

Masuknya KBK 2004, KTSP 2006, dan Kurikulum 2013 mencerminkan pergeseran paradigma menuju konstruktivisme, yang menempatkan peserta didik sebagai pembangun pengetahuan melalui pengalaman belajar aktif [8]. Relevansi fase ini terhadap Kurikulum Merdeka sangat kuat, terutama melalui penguatan kompetensi, pembelajaran kontekstual, pendekatan saintifik, serta penilaian autentik. Paradigma konstruktivistik membuka jalan bagi lahirnya pembelajaran yang memberi ruang kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah konsep-konsep inti yang kini diperluas dan diperdalam dalam Kurikulum Merdeka[12]. Proses pengembangan kurikulum dilakukan melalui penilaian kebutuhan yang melibatkan survei dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan. Kurikulum ini dibangun berdasarkan praktik terbaik internasional dan dirancang untuk memperbaiki sistem Pendidikan[13].

Kurikulum Merdeka merupakan puncak transformasi paradigma yang menggabungkan nilai humanistik, struktur teknokratis yang efisien, serta pendekatan konstruktivistik menjadi model pembelajaran yang progresif dan fleksibel. Kurikulum ini merepresentasikan perubahan besar: dari berfokus pada apa yang diajarkan menuju bagaimana peserta didik belajar. Relevansinya terletak pada kemampuan kurikulum untuk menyesuaikan diri dengan keberagaman sekolah, perkembangan zaman, serta kebutuhan masa depan. Profil Pelajar Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi, dan proyek penguatan karakter menjadi simbol bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing global[14].

Perancangan Kurikulum Merdeka, yang resmi diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristekdikti), merupakan upaya strategis untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan di Indonesia, terutama pada aspek literasi dan numerasi. Kurikulum ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan pembelajaran abad ke-21, serta sebagai solusi atas rendahnya capaian siswa Indonesia dalam berbagai asesmen internasional seperti PISA dan TIMSS. Melalui pendekatan yang lebih fleksibel, Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan potensi peserta didik secara utuh, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman[15]. Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi instrumen reformasi

pendidikan, tetapi juga wujud transformasi paradigma pembelajaran di Indonesia: dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang menekankan kompetensi, kreativitas, karakter, dan kemandirian siswa. Dengan strategi implementasi bertahap, asesmen kesiapan, dan fleksibilitas kurikulum, program ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam memajukan mutu pendidikan nasional menghadapi era digital dan tantangan global.

Sistem pendidikan Indonesia terus melakukan pembaruan kurikulum untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan. Kurikulum yang sebelumnya berisi dokumen panjang dan kompleks kini disederhanakan. Hadirnya Kurikulum Merdeka menunjukkan adanya kebebasan yang lebih besar bagi guru dan siswa dalam menentukan proses pembelajaran di kelas. Inti perubahan kurikulum adalah memastikan pembelajaran dan administrasi tidak menjadi beban bagi guru[15].

4. KESIMPULAN

Perubahan kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor politik, faktor ideologis dan faktor pedagogis. Dengan bergantinya system pemerintahan dan kebijakan serta menimbang kebutuhan masyarakat kurikulum sangat perlu adanya perubahan. Nilai Pancasila dan nasionalisme tetap menjadi fondasi utama, meski implementasinya terus beradaptasi dengan tantangan zaman dan kebutuhan global. Perubahan kurikulum sering terjadi akibat perubahan pandangan tentang bagaimana peserta didik belajar. Dahulu pembelajaran berpusat pada guru (teacher-centered), tetapi paradigma baru menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik (student-centered). Pendekatan baru menekankan kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah, serta kemampuan berpikir tingkat tinggi. Perkembangan teknologi melahirkan model pembelajaran baru seperti blended learning, flipped classroom, dan personalized learning. Agar pembelajaran lebih adaptif dan berbasis teknologi, struktur dan sistem kurikulum harus berubah menyesuaikan ekosistem digital. Perjalanan kurikulum Indonesia dari standarisasi menuju fleksibilitas menggambarkan evolusi pemikiran tentang bagaimana pendidikan yang berkualitas seharusnya didesain. Dari instrumen pemerintah untuk keseragaman nasional, kurikulum bertransformasi menjadi kerangka yang memberdayakan unit pendidikan dan guru sebagai ujung tombak. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa fleksibilitas ini diimbangi dengan peningkatan kapasitas guru dalam pengembangan kurikulum dan asesmen, serta sistem pendukung yang memadai agar fleksibilitas tidak berujung pada kesenjangan kualitas yang lebar. Namun, arah paradigma ini telah menunjukkan komitmen untuk menempatkan kebutuhan peserta didik di pusat proses pendidikan.

REFERENCES

- [1] A. P. Rahmawati and E. D. Kusumaningtyas, "Implementation of Project Based Learning Though Merdeka Curriculum in Teaching Speaking Skills," *English Educ. Lit. J.*, vol. 4, no. 01, pp. 25–34, 2024, doi: 10.53863/ejou.v4i01.986.
- [2] R. Raharjo, "Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020," *PKn Progresif J. Pemikir. dan Penelit. Kewarganegaraan*, vol. 15, no. 1, p. 63, 2020, doi: 10.20961/pknp.v15i1.44901.
- [3] L. S. Romlah, L. Wahid, Wakidi, Badruddin, and R. Purnama, "Manajemen Strategis Kurikulum di Era Digital: Systematic Literature Review," *Didakt. J. Kependidikan*, vol. 13, no. 001 Des, pp. 1057–1072, 2024, [Online]. Available: <https://www.jurnaldidaktika.org/contents/article/view/1401>
- [4] B. M. Marzuqi and N. Ahid, "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia: Prinsip," *JoIEM (Journal Islam. Educ. Manag.*, vol. 4, pp. 99–116, 2023, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.30762/joiem.v4i2.1284%7D>
- [5] M. Faizin, N. Izzatu, D. Kamaliyah, and R. M. Celia, "PENGARUH IDEOLOGI ASING DALAM KURIKULUM," vol. 04, no. 06, pp. 259–266, 2025.
- [6] S. P. Collins *et al.*, "Evaluasi Implementasi KTSP dan Kurikulum 2013 Pada SMK se-Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur," vol. 22, no. 1, pp. 167–186, 2021.
- [7] A. H. Nasution, "Rencana Pelajaran (Leer Plan) 1947 Dan Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan Pasca Kemerdekaan 1945 " 1950," *Jupiiis J. Pendidik. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 12, no. 2, pp. 516–526, 2020, doi: 10.24114/jupiiis.v12i2.40221.
- [8] A. Suhendi, P. Purwarno, and S. Chairani, "Constructivism-Based Teaching and Learning in Indonesian Education," *KnE Soc. Sci.*, vol. 2021, pp. 76–89, 2021, doi: 10.18502/kss.v5i4.8668.

- [9] K. Setyaningsih, “Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan,” pp. 76–94.
- [10] R. Manullang and C. R. A. Marpaung, “Perubahan Paradigma dalam Kurikulum Pendidikan Merdeka Bagi Guru Sekolah Dasar terhadap Metode Pengajaran dan Evaluasi,” *J. Teknol. Pendidik.*, vol. 1, no. 4, p. 10, 2024, doi: 10.47134/jtp.v1i4.488.
- [11] D. Febriyenti, N. Putri, A. Asmendri, and M. Sari, “Perkembangan Kurikulum di Indonesia dalam Perspektif Sejarah,” *Al-Idaroh J. Stud. Manaj. Pendidik. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 195–214, 2023, doi: 10.54437/alidaroh.v7i2.932.
- [12] D. R. Martatiana, A. Derlis, H. W. Aviarizki, R. R. Jurdil, T. Andayani, and O. S. Hidayat, “Analisis Komparasi Implementasi Kurikulum Merdeka Dan Kurikulum 2013,” *Muallimuna J. Madrasah Ibtidaiyah*, vol. 9, no. 1, p. 96, 2023, doi: 10.31602/muallimuna.v9i1.11600.
- [13] A. P. Wibawa *et al.*, “Publishing management curriculum in Indonesia,” *Int. J. Educ. Res. Open*, vol. 3, no. December 2021, p. 100103, 2022, doi: 10.1016/j.ijedro.2021.100103.
- [14] M. Nur Qolbi and W. Susiawati, “Kurikulum Merdeka: Kurikulum Berorientasi Masa Depan,” *Mauriduna J. Islam. Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 45–63, 2025, doi: 10.37274/mauriduna.v6i1.1320.
- [15] A. Almarisi, “Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah dalam Perspektif Historis,” *MUKADIMAH J. Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sos.*, vol. 7, no. 1, pp. 111–117, 2023, doi: 10.30743/mkd.v7i1.6291.